

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik merupakan cara paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan¹. Tidak hanya itu, adanya sebuah kebijakan – kebijakan yang kita rasakan, merupakan sebuah produk politik yang di lakukan oleh pejabat tinggi negara, dimana kebijakan tersebutlah yang akan menentukan atau mempengaruhi kehidupan tatanan masyarakat. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi². Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana rakyat turun ikut andil dalam pemerintahan, pada tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi(pemilu).

Secara umum partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Pemerintah memiliki kewenangan dalam melaksanakan keputusan politik dan masyarakat berhak untuk menentukan keputusan politik³. Partisipasi politik berkaitan dengan perilaku politik. Perilaku politik diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan langsung

¹ Rahman Asmika, 2018, Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hal. 1

² Liando Daud, 2016, PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014), Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.368.

dengan proses politik terutama dalam pengambilan keputusan politik masyarakat yang berpartisipasi⁴.

Partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif⁵. Partisipasi aktif erat kaitannya dengan kesadaran politik. Kesadaran politik yang dimaksud yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat memiliki kesadaran politik melalui pendidikan, minat, perhatian serta kepercayaan pada pemerintah. Sementara partisipasi pasif adalah partisipasi yang memiliki tingkat kepercayaan dan kesadaran politik yang rendah terhadap pemerintah⁶. Masyarakat yang tidak termasuk ke dalam partisipasi aktif dan pasif dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang apatis atau golongan putih (golput). Golongan putih adalah seseorang yang memiliki hak pilih namun ia tidak menggunakan hak pilihnya⁷. Dalam negara demokrasi, partisipasi politik merupakan hal yang dianggap penting, karena suara partisipasi dari masyarakat dimanifestasikan untuk kegiatan pemilihan umum.

Pemilihan umum diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang berada pada tangan rakyat. Apapun kebijakan pemerintah harus berdasarkan kesepakatan dengan rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat akan menciptakan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat⁸.

⁴ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1990), hal.130.

⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet VII (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal.179.

⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet IV, hal.369.

⁷ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal.182.

⁸ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal.222-226.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil(Luberjurdil). Pemilihan umum terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), Pemilihan Legislatif (pileg) yang meliputi DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota⁹.

Berbicara tentang agama Islam pasti memiliki keterkaitan dengan politik. Islam merupakan sebuah agama yang sama sekali tidak memisahkan urusan tentang dunia dengan suatu hal yang dilakukan demi kebaikan dalam urusan akhirat. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, santun, menghormati orang lain, tanggung jawab, istiqamah, terbuka, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kiai/Mudir adalah kata sapaan kepada alim atau ulama¹⁰, serta gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama atau tokoh agama Islam yang memimpin pondok pesantren¹¹. Menurut Suprayogo sebutan Kiai (Mudir) sebenarnya merupakan istilah yang dipakai oleh kalangan masyarakat Jawa untuk menyebut elit agama Islam¹². Kiai (Mudir) merupakan suatu elit yang mempunyai

⁹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum", (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.10, No.1, 2018), hal.58. [Jurnal on-line], <http://journal.unime.ac.id>

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kiai> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

¹¹ Dhofier Zamakhsyari, 2009, Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visi mengenai Masa Depan Indonesia). Hal 55

¹² Suprayogo, Imam, 2007, Kiai dan Politik : Membaca Citra Politik Kiai. Hal 1

kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai (Mudir) menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Terkait dengan penelitian, penulis tertarik untuk memfokuskan pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pemilihan Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang terdiri dari 3 pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. KPU RI membuka pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 Pasangan calon yang telah terdaftar di KPU RI yakni Anis Baswedan dan Muhaemin Iskandar (Amin) yang diusung oleh partai NASDEM yang punya 59 Kursi di DPR/ (10,26%), PKB yang punya 58 kursi DPR/(10,09%) dan PKS dengan 50 Kursi DPR/ (8,7%). Gabungan tiga partai politik tersebut total punya (29,05%) hingga telah melampaui syarat ambang batas pencalonan presiden yakni 20 persen kursi DPR. Pasangan no urut 2 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh partai PDIP dengan 128 kursi (22,26%), PPP dengan 19 Kursi (3,30%) dengan total 147 Kursi/(25,56%). Pasangan no urut 3 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh partai GERINDRA dengan perolehan 78 kursi/(13,57%), GOLKAR dengan 85 Kursi/(14,78%), PAN dengan perolehan 44 kursi DPR/(7,65%) dan DEMOKRAT dengan 54 Kursi DPR/(9,39%) dengan Total 261 Kursi DPR/(45,39%). Pasalnya 3 bulan menjelang

Pemilihan Presiden 2024 mendatang setiap pasangan calon mulai mencuri perhatian melalui media sosial, dan media cetak seperti koran, banner dan baliho¹³. Tampak di sepanjang jalan Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya terdapat beberapa baliho, salah satunya yaitu :

Gambar 1.1
Baliho Calon Presiden 2024¹⁴



Setiap pasangan calon presiden memiliki strategi kampanye blusukan agar dapat bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Seperti salah satu pasangan yaitu Anis Baswedan. Pasangan ini bersilaturahmi ke beberapa pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dalam rangka mendapatkan dan meningkatkan suara dukungan pemilih di pondok pesantren meskipun kadang didalamnya diselimuti dengan kegiatan kegiatan formal seperti seminar dll, melalui kyai/ (Mudir M'had) dan ustadz di pondok pesantren.

¹³ Fajar Guniawan, "Menuju Pesta Rakyat Jawa Barat". Artikel ini diakses pada 20 Oktober 2023 dari https://www.researchgate.net/publication/324257738_MENUJU_PESTA_RAKYAT

¹⁴ Baliho terletak di Jalan Muktamar Bertepatan dengan jalan Menuju Pondok Pesantren At Tajdid Tasikmalaya

Gambar 1.2
Kunjungan Anies Baswedan ke Salah Satu Pesantren di Kab. Tasikmalaya¹⁵

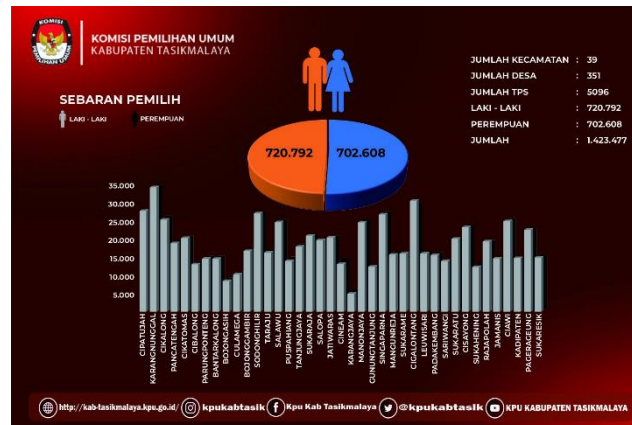


Antusias masyarakat dalam Pemilihan 2024 cukup besar. Dibuktikan dengan data yang didapat dari KPU Kab Tasikmalaya, yaitu sebesar 1.423.477 juta lebih masyarakat memiliki hak pilih dalam Pemilihan Presiden 2024. Dari jumlah tersebut terdapat hak pilih pemilih pemula. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Jamaludin mengatakan, dari jumlah tersebut, 30,5 persen adalah generasi milenial. "434.057 adalah pemula. Disusul generasi X sebanyak 27,8 persen atau 395.591 pemilih, dan generasi Z sebanyak 24,9 persen, atau 353.848 pemilih," RRI, Kamis (20/7/2023). Dibandingkan dengan jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Presiden sebelumnya tingkat partisipasi pemilih pemula hanya mencapai 25 persen¹⁶.

¹⁵ Blusukan Kampanye Calon Presiden 2024 Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Anies Baswedan di Salah Satu Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya.

¹⁶ Nova Nugraha, "Milenial dominasi pemilih kabupaten tasikmalalaya pada pemilu 2024." artikel ini diakses pada Sabtu 21 Oktober 2023 dari <https://www.rri.go.id/bandung/pemilu/292571/milenial-dominasi-pemilih-kabupaten-tasikmalaya-pada-pemilu-2024>.

Gambar 1.3
Dominasi Pemilih



(Sumber, KPU Kab Tasikmalaya)

Partisipasi masyarakat, khususnya bagi pemilih yang baru menggunakan hak pilih sangat diperhitungkan suaranya dalam pemilihan umum. Seperti yang tercatat dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008, Bab IV Pasal 19 pada Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:¹⁷

“Pemilih pemula didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan umum genap berusia 17 tahun atau lebih dan mempunyai hak untuk memilih. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1, penyelenggara pemilu telah mencantumkan pemilih dalam daftar memilih”

Pemilih pemula memiliki latar belakang, sifat dan karakter yang berbeda beda. Umumnya pemilih pemula berasal dari para pelajar. Kalangan pemilih pemula dalam kegiatan partisipasi politik menjadikan sasaran bagi kegiatan politik

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada tanggal 21 Oktober November 2023, <http://www.dpr.go.id>.

karena sifatnya yang apatis, rendahnya pengetahuan dan pendidikan akan menjadikan pemilih pemula rentan dimobilisasi partisipasinya¹⁸. Termasuk pada pemilih pemula di kalangan pondok pesantren lebih mudah untuk dimobilisasi suaranya oleh pendiri pondok pesantren¹⁹. Pondok pesantren adalah suatu perkumpulan kecil dari masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam²⁰. Dalam lingkungan pondok pesantren terdapat tokoh yang dihormati dan berpengaruh besar terhadap masyarakat, tokoh tersebut adalah kyai/Mudir Ma'had.

Mudir M'ahad dianggap memiliki pengetahuan agama yang tinggi untuk menyampaikan ceramah di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengetahuan agamanya Mudir M'ahad memiliki beberapa murid yang disebut dengan santri²¹. Mudir M'ahad memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian santri. Sehingga peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh kyai akan ditaati oleh setiap santri dalam lingkungan pondok pesantren.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian pada pondok pesantren. Dikarenakan ingin melihat berapa besar tingkat partisipasi pemilih pemula dalam lingkungan pondok pesantren yang memiliki kesan sosial-religius terkait dengan pilihan politiknya. Apakah dalam berpartisipasi santri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari figur kyai/mudir. Penulis mengambil salah

¹⁸ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal.4

¹⁹ Syamsul Ma'arif, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren", (Jawa Tengah: Jurnal Tarbiyah, Universitas IAIN Walisongo, Vol.15, No.2, 2010), hal.284. [Jurnal online], <http://journal.radenfatah.ac.id>.

²⁰ Ana Shofiya dan M.Turhan, "Orientasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 (Studi Pada Santri di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyi'in Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto)", (Surabaya: Jurnal Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Surabaya, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.2, 2014)", hal.611. [Jurnal on-line], <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id>.

²¹ Syamsul Ma'arif, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren", hal.284.

satu pondok pesantren di daerah Tasikmalaya yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid. Menariknya untuk diteliti Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid memiliki keunikan, yaitu tingginya program leadership yang sudah diterapkan sejak awal masa pendirian hingga saat ini oleh pendiri pondok pesantren.

Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid didirikan oleh tokoh Muhammadiyah Pendahulu pada 18 Juli 1999²². Letak pondok pesantren berdekatan dengan Pusat Perkotaan Singaparna, yang berada di Jalan Luwisari Tasikmalaya Jawa Barat. Pondok Pesantren ini tidak menutup diri dari lingkungan sekitar, melainkan berinteraksi secara aktif dalam lingkungan masyarakat. Dengan letak geografis dan interaksi aktif di lingkungan masyarakat, seharusnya membuat para santri dapat dengan mudah untuk mengakses informasi politik baik dari lingkungan masyarakat yang ada di pondok pesantren maupun di luar lingkungan pondok pesantren.

Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid mengusung konsep pondok pesantren modern. Maksud dari konsep pondok pesantren modern, yaitu pondok pesantren tidak hanya fokus mengajarkan ilmu agama saja. Melainkan mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat umum seperti keterampilan di bidang ekonomi/Wirausaha, Keterampilan berorganisasi, Kecakapan *Public Speaking* dan kegiatan kegiatan lain seperti kegiatan kepanduan dan pencak silat semua kegiatan tersebut termasuk kedalam

²² PDM Kab Tasikmalaya “Profil Pondok Pesantren At Tajdid Muhammadiyah Tasikmalaya” diakses pada sabtu 21 Oktober 2023 <http://tasikmalaya.muhammadiyah.or.id/content-23-sdet-mahad-attajdid.html>.

Daily Activity Santri yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya. Sedangkan pondok pesantren pada umumnya mengusung corak tradisional hanya mengajarkan dan menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam saja tanpa ada ilmu keterampilan²³.

Salah satu indikasi kuat bahwa Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya ini lebih mengedepankan Praktik Kepemimpinan (*Leadership*) daripada bidang kewirausahaan tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan kewirausahaan menjadi program tertentu, salah satunya adalah program pesantren yang bernama Sekolah Kader berupa (Perkaderan Formal Organisasi Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya).

Program ini adalah unit dari Pesantren At Tajdid Muhammadiyah Tasikmalaya yang menyelenggarakan Praktik Kepemimpinan. Salah satu programnya yaitu program Perkaderan sebagai Ikhtiar dalam membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah dan Berkarakter kepemimpinan. Program Perkaderan ini, dapat menunjukkan sikap santri dalam praktik kepemimpinan, hal ini didukung dengan data raport kegiatan yang menyatakan bahwa seluruh (100%) pada aspek aplikasi santri mendapatkan nilai paling tinggi dengan kategori praktik kepemimpinan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya sehingga menumbuhkan sikap kemandirian yang lebih tinggi.

Pondok Pesantren At Tajdid Tasikmalaya terdiri dari santriwati dan santriwan. Dalam lingkungan pendidikan Pondok Pesantren terdapat beberapa

²³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 62.

jenjang pendidikan yaitu, SMP & SMA Berdasarkan data tersebut, yang termasuk kategori pemilih pemula dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang, yaitu siswa kelas XI dan XII SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya yang berusia 17-19 tahun, memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang berdomisili Jawa Barat, memiliki surat undangan memilih, serta menggunakan hak pilihnya.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berapa besar partisipasi pemilih pemula siswa kelas XII SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden 2024. Serta bagaimana cara Kiai mempengaruhi partisipasi politik santri dalam berpartisipasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan pertanyaan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana cara kiai mempengaruhi santri terhadap partisipasi politik pilpres 2024 mendatang ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis memberikan pembatasan pada permasalahan yang akan dibahas pada bagian pembahasan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan hanya akan terbatas pada peran kiai dalam mempengaruhi partisipasi dan preferensi politik santri kelas XII SMA At Tajdid Muhammadiyah Tasikmalaya dalam Pemilihan Presiden 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat partisipasi santri dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
2. Untuk menjelaskan peran kiai dalam mempengaruhi partisipasi dan preferensi politik santri (pemilih pemula) siswa kelas XII SMA At Tajdid Tasikmalaya dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi sekolah dalam menumbuhkan partisipasi dan prilaku politik santri.
- 2) Sebagai bahan kajian di lingkungan akademik dalam memahami Partisipasi dan Prilaku Politik santri.
- 3) Menjelaskan mengenai pentingnya santri berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2024.

2. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk pengembangan khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu politik khususnya dalam diskursus kajian tentang partisipasi politik yang dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dalam menelaah kajian-kajian tentang partisipasi politik lainnya.

- 2) Rancangan teoritis untuk mengkaji bagaimana santri (pemilih pemula) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politiknya.
- 3) Rancangan teoritis untuk melakukan penelitian terkait Partisipasi dan perilaku politik santri (pemilih pemula) secara keseluruhan.